

Indonesian passive voice has; (4) Adverb of manner and time in English passive voice should be placed between the Aux and the verb. This, of course, cannot be done in Indonesian; and (5) English passive voice has less variation than Indonesian passive voice.

Eventhough English passive voice and Indonesian passive voice are different in five points they have the same transformation rules in passivization, i.e. permutation, substitution, deletion, and addition.

### BIBLIOGRAPHY

- Ba'dulu, Abd. Muis. 2000. "Morfosintaksis". Diktat Program Pascasarjana UNM.
- Bickford, J. Albert. 2000. "Alat Penganalisis Bahasa-bahasa di Dunia: Morfologi dan Sintaksis". Terjemahan oleh Moses Usman dari *Tools for Analyzing the World's Languages: Morphology and Syntax*. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Cartier, Alice. 1979. *Devoiced Transitive Verb Sentence in Formal Indonesian*. Dalam Plank
- Chomsky, Noam. 1965. *Aspect of the Theory of Syntax*. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.
- Chung, Sandra, 1976. *On the Subject of Two Passives in Indonesian*. In Li, 1976.
- Crystal, David. 1980. *A First Dictionary of Linguistics and Phonetics*. London: Andrea Deutch.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 2003. *Psikolinguistik, Pengantar Pemahaman Bahasa Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ibrahim, Gufran Ali. 2002. "Keergatifan dan Ketransitifan dalam Wacana Bahasa Tae". Disertasi tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Kaswanti Purwo, Bambang.(ed).1989. *Serpih-serpih Telaah Pasif Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahmoed, Abd. Hamid. 1992. *Ayat Pasif Bahasa Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Nasanius, Yassir. "Teori Linguistik Government and Binding: A paper presented in Linguistics Doctoral Program of Universitas Sebelas Maret at Januari 25, 2008.
- Lyons, John. 1991. *Chomsky*. 3<sup>rd</sup> edition. Great Britain: Fontana Press.

**ANALISIS WACANA KRITIS  
TERHADAP PEMBERITAAN MENGENAI INTERPELASI DPR**  
*(Critical Discourse Analysis Around Interpellation News of Legislative Assembly)*

**Musayyedah**

Balai Bahasa Ujung Pandang  
Jalan Sultan Alauddin Km 7 Tala Salapang, Makassar  
Telepon (0411) 882403, Fax. (0411) 882403  
Diterima: 20 April 2010; Disetujui: 5 Juli 2010

**Abstract**

*This writing is intended to describe critical discourse analysis around interpellation news of Legislative Assembly. Method used is descriptive qualitative by observing, involving, and noting technique. The writing shows that the usage of vocabulary relating to interpellation news is divided into three: (1) use of certain word classification to show identity, (2) expressive word choice ideologically in interpellation discourse, and (3) participant relation on interpellation discourse.*

**Key words:** *critical discourse, interpellation*

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan wacana kritis seputar pemberitaan mengenai interpelasi di DPR. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik simak, libat, catat. Tulisan ini menunjukkan bahwa penggunaan kosakata dalam berbagai berita terkait interpelasi dibagi ke dalam tiga bagian yakni: (1) penggunaan klasifikasi kata tertentu untuk menunjukkan identitas, (2) pilihan kosakata ekspresif secara ideologis dalam wacana interpelasi, dan (3) relasi partisipan pada wacana interpelasi.

**Kata kunci:** wacana kritis, interpelasi,

**1. Pendahuluan**

Wacana sering didefinisikan dengan dua cara, yaitu sebagai sebuah unit bahasa khusus (di atas kalimat) dan sebagai sebuah fokus khusus. Dua definisi ini mencerminkan dua paradigma yang berbeda, formalitas dan fungsionalis. Definisi klasik wacana berasal dari asumsi -asumsi formalitas dan diperjelas oleh Stubbs (dalam Schrifin, 2007) bahwa wacana adalah bahasa di atas kalimat atau

di atas klausa. Dalam pandangan struktural, wacana di lihat sebagai sebuah tingkat struktur yang lebih tinggi daripada unit teks lain. Senada dengan definisi tersebut, berdasarkan keutuhannya, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan merupakan perwujudan pemakaian bahasa yang utuh. Dalam hierarki gramatikal wacana merupakan satuan gramatikal yang tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk

karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dsb), paragraf, kalimat yang membawa amanat lengkap (Kridalaksana, 2001). Yang dipentingkan adalah keutuhan atau kelengkapan maknanya. Bentuk konkretnya dapat berupa kata, kalimat, paragraf, atau karangan utuh.

## 2. Kerangka Teori

Analisis wacana sebagai ilmu bahasa semula banyak dipergunakan untuk menelaah wacana percakapan. Kini banyak para ahli analisis wacana yang meneliti berbagai macam wacana. Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya, Cook (1994) menggunakan analisis wacana untuk menelaah prosa dan puisi; Fairclough (1995) menggunakan analisis wacana untuk menelaah masalah-masalah sosial. Di sisi lain Teun Van Dijk (1995) dalam konsep *Critical Discourse* Analisis menjelaskan bahwa analisis wacana merupakan tipe analisis yang menelaah perlakuan yang tidak benar terhadap kekuasaan masyarakat, terhadap hukum yang melindungi penguasa, dan ketidakadilan. Semua hal tersebut dinyatakan baik secara lisan maupun tulis dalam konteks sosial dan politik. Analisis wacana semacam ini disebut analisis wacana kritis.

Penafsiran wacana berita dengan menggunakan piranti analisis wacana kritis merupakan salah satu bagian dari analisis wacana. Ideologi dan kekuasaan adalah piranti analisis yang paling tepat digunakan dalam makalah ini. Wacana berita sebagai komunikasi tulis yang ditinjau dari sudut pandang tata nilai dan kepercayaan yang mewakili pandangan dunia dari suatu pengalaman. Dalam pandangan analisis wacana kritis, tidak ada wacana yang vakum secara sosial.

### 2.1 Ideologi dan Kekuasaan dalam Wacana Berita

Persoalan ideologi dan kekuasaan

merupakan unsur utama dalam analisis wacana kritis yang memiliki tiga dimensi analisis yaitu.

- a. analisis teks yang memokuskan pada bahasa tekstual yang sebenarnya, misalnya kosakata, struktur makro dan struktur mikro
- b. analisis praktis wacana mengkaji sebuah teks yang dihasilkan, ditafsirkan dan didistribusikan, serta urutan wacana, dan;
- c. analisis praktis sosiokultural, yang memokuskan hubungan praktis kewacanaan dengan masyarakat, institusi, dan kebudayaan terutama hubungan antara wacana dengan dimensi ideologi.

Bagaimana sebuah teks dimaknai? Menurut Jhon Fiske, makna tidak intrinsik ada dalam teks itu sendiri, seseorang yang membaca sebuah teks berita tidak menemukan makna dalam teks, sebab yang dia temukan dan hadapi secara langsung adalah pesan dalam teks. Makna itu diproduksi lewat proses yang aktif dan dinamis, baik dari sisi pembuat maupun khalayak pembaca. Pembaca dan teks secara bersama-sama mempunyai andil yang sama dalam memproduksi pemaknaan, dan hubungan itu menempatkan seseorang sebagai suatu bagian dari hubungannya dengan sistem tata nilai yang lebih besar di mana dia hidup dalam masyarakat. Pada titik inilah ideologi bekerja.

Menurut Van Dijk (1995) ideologi terutama dimaksudkan untuk mengatur masalah tindakan dan praktik individu atau anggota kelompok. Ideologi akan membuat anggota suatu kelompok akan bertindak dalam situasi yang sama, dapat menghubungkan masalah mereka, dan memberikan kontribusi dalam membentuk solidaritas dan kohesi dalam kelompok.

## 2.2 Pendekatan, Bentuk, dan Fungsi Wacana Berita

Titik penting dalam memahami media menurut paradigma kritis adalah bagaimana media melakukan politik pemaknaan. Dalam wacana berita, pemaknaan itu tidak hanya dipandang sebagai produksi bahasa semata. Makna merupakan suatu produksi sosial, suatu praktik. Makna tidaklah secara sederhana dapat dianggap sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi sebuah pertentangan sosial, perjuangan dalam memenangkan wacana.

Fungsi wacana berita, dalam pemahaman Fairlouch (1995) dalam Jufri (2007) mempunyai tiga dampak, yaitu:

- a. pemberian andil dalam pengkonstruksian identitas sosial dalam posisi subjek,
- b. bantuan wacana berita dalam pengkonstruksian relasi sosial dalam suatu komunitas, dan;
- c. pemberian kontribusi dalam pengkonstruksian sistem pengetahuan dalam kepercayaan.

## 3. Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deksriptif kualitatif. Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2000) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan dalam peristilahannya. Teknik yang digunakan teknik simak, libat, dan catat.

## 4. Pembahasan

Dengan fungsi wacana berita seperti diuraikan di atas, tulisan ini memandang wacana berita bukanlah sesuatu yang netral yang memberitakan kelompok yang terlibat apa adanya.

Kenyataan yang diperoleh melalui analisis sederhana ini, wacana berita memiliki karakteristik sebagai berikut:

Pertama, realitas pada dasarnya bukanlah suatu yang ada dengan sendirinya, tetapi dibentuk oleh konstruksi sosial. Dalam proses pembentukan itu terjadi perebutan dan pertarungan pemaknaan. Kedua, ideologi adalah faktor yang penting dan esensial dalam analisis wacana berita. Berita selalu dipandang dari kacamata “ideologi” melalui makna kelompok yang dominan menyebarkan dan menanamkan kepercayaan dan keyakinannya dalam mendefinisikan peristiwa. Analisis wacana tertarik dengan bagaimana ideologi menelusup dalam teks yang dihayati secara bersama.

Bahasa dan kekuasaan sering dikaji oleh para linguist dan juga kaitannya dengan praktik sosial, khususnya struktur sosial dan struktur politik. Fairlough (1995) berpendapat pandangan hegemoni menekankan pada teori kekuasaan dengan pemahaman bahwa kekuasaan suatu komunitas yang dominan dapat menguasai komunitas yang lain. Penggunaan bahasa dipandang bukan sebagai persoalan teknis tata bahasa atau linguistik belaka, melainkan ekspresi dari ideologi untuk membentuk pendapat umum, membenarkan pihak sendiri dan mendiskreditkan pihak lain. Seperti halnya perseteruan antara lembaga DPR dan presiden mengenai pentingnya kehadiran presiden di DPR untuk memberikan penjelasan mengenai dukungan pemerintah terhadap Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 1747 tentang perluasan sanksi kepada Iran.

### Kutipan 1

*Ali Mochtar menegasakan, jika Presiden tak datang. Ini benar-benar pelecehan kepada DPR.”*

Pernyataan Ali Mochtar dengan menggunakan kata *pelecehan* merupakan penegasan terhadap pandangan bahwa kehadiran presiden dalam sidang paripurna DPR tentang interpelasi merupakan suatu kewajiban yang mesti dijalankan oleh presiden sebagai Kepala Negara, sesuai pernyataan selanjutnya.

Kutipan 2

*Rakyat ingin melihat pemimpinnya tegar dan penuh tanggung jawab dalam menghadapi segala carut marut kondisi bangsa.*

Pernyataan pada frase *pemimpinnya tegar dan penuh tanggung jawab* merupakan pernyataan lanjutan yang mendukung kata *pelecehan* pada pernyataan yang disampaikan oleh Ali Mochtar.

Di sisi lain, beberapa pihak justru tidak terlalu merisaukan ketidakhadiran presiden. Persoalannya, hal seperti ini merupakan dinamika politik bagi negara. Pihak DPR tidak perlu terlalu menuntut banyak hal, karena pada dasarnya, antara pihak DPR dan pemerintah memiliki kesetaraan posisi sehingga adanya keinginan presiden untuk mewakili kehadirannya dalam sidang paripurna merupakan hal wajar. Seperti pernyataan Wapres berikut ini:

Kutipan 3

*Menurut wapres, apa yang terjadi di DPR dengan pengajuan interpelasi merupakan suatu yang biasa. "Menurut saya, persoalannya normal-normal saja, dan itulah dinamika politik." Kata wapres.*

Pernyataan di atas, pada kata *interpelasi* sesuatu yang biasa dan dinamika politik, merupakan pilihan kosakata yang sangat kontras dengan pihak DPR yang menyatakan bahwa persoalan kehadiran presiden dalam sidang paripurna DPR mengenai Interpelasi merupakan hal yang urgen dan dikatakan sebagai sebuah *pelecehan* bagi DPR seperti yang

dikemukakan di atas. Pernyataan lain yang mendukung penggunaan kosakata *pelecehan* tersebut adalah:

Kutipan 4

*Mereka berpendapat, presiden perlu hadir karena menteri telah menjelaskan materi interpelasi itu pada rapat komisi. Penjelasan ini tidak bisa diterima. Presiden di Negara maju pun sering memberi penjelasan di depan parlemen. Mereka menilai ketidakhadiran presiden sebagai bentuk pelecehan kepada DPR karena interpelasi itu ditempuh dengan proses yang panjang.*

Munculnya kosakata *pelecehan* kembali pada pernyataan di atas, seolah-olah menegaskan betapa pentingnya kehadiran presiden dalam sidang tersebut yang pada kenyataannya hanya disambut biasa oleh beberapa pihak seperti presiden dan wapres.

Ketidaksinkronisan pendapat di antara beberapa pihak menimbulkan pro dan kontra yang cukup alot. Namun, masih terkait dengan pihak yang memahami ketidakhadiran presiden sebagai hak mutlak presiden.

Kutipan 5

*Mereka yang memahami ketidakhadiran presiden berlindung pada tata tertib DPR pasal 174 ayat 4 yang menyebutkan keterangan dan jawaban presiden bisa diwakilkan kepada menteri, "inti interpelasi minta keterangan presiden, bukan undang presiden," ucap Ferry Mursyidan Baldan dari F-PG. Mereka yang mengacu pada presiden sebelumnya, yaitu interpelasi kasus Sipadan-Ligitan yang dihadiri oleh Menkokesra.*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa persoalan interpelasi bukan hal yang luar biasa. Kehadiran maupun ketidakhadiran presiden, tidaklah menjadi persoalan. Karena pada era Megawati, interpelasi Sipadan dan Ligitan diwakili oleh Menkokesra.

Lebih lanjut, presiden juga siap berkomunikasi dengan DPR. Beliau mengatakan bahwa jangan sampai ini merupakan permainan politik. Yang harus diperhatikan adalah kondisi perekonomian di negara kita dan stabilitas keamanannya.

Nilai ekspresional seperti yang tercantum pada beberapa pernyataan pihak yang bertentangan pada wacana interpelasi di atas misalnya kosakata *pelecehan* kepada DPR, pemimpin yang tegar dan bertanggung jawab. Dan interpelasi adalah sesuatu yang biasa merupakan pilihan kata untuk menunjukkan identitas kedua lembaga yang bersebrangan faham tentang interpelasi.

#### **4.1 Pilihan Kosakata Ekspresif Secara Idiologis dalam Wacana Interpelasi**

Nilai ekspresi yang muncul dalam wacana interpelasi termuat dalam kosakata *membangun rasa saling percaya, kedewasaan berpolitik, posisi sejajar*. Pilihan kosakata yang muncul dalam wacana tersebut dianggap bernilai positif. Hal ini didasarkan pendapat James L.K. (1980:325) merupakan seni menilai sesuatu dengan dua kategori yaitu baik dan buruk. Oleh karena itu, pilihan kosakata tersebut lebih mengacu pada penilaian positif terhadap SBY (Susilo Bambang Yudoyono).

##### **Kutipan 6**

*Presiden Yudoyono mengatakan banyak tugas dan kewajiban pemerintah dan DPR untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Politik luar negeri penting tetapi agenda dalam negeri seperti peningkatan kesejahteraan rakyat juga tidak kalah pentingnya.*

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa SBY ingin mengekspresikan pencitraan kedewasaannya dalam berpolitik dengan tidak mengorbankan kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan rakyat.

Selain kedua hal di atas, ada beberapa kosakata yang diperjuangkan secara ideologis oleh pihak SBY dan pihak DPR. Kosakata-kosakata tersebut adalah:

1. pihak SBY lebih sering menyatakan dengan kedewasaan berpolitik,
2. pihak DPR lebih sering menggunakan kosakata *pelecehan*.

Ideologi dan kekuasaan yang terwujud dalam pilihan kosakata bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi sesuatu yang diperjuangkan dalam perebutan sosial (Jufri, 2005). Lebih lanjut, Van Dijk menyatakan bahwa nilai-nilai tertentu yang tercermin dalam pilihan kosakata tersebut, secara ideologis dan kekuasaan hanya dapat dimenangkan dengan perjuangan sosial. Teori Gramscis dan Fairclough (1995) mengharapkan agar penerimaan komunitas yang didominasi terhadap kehadiran komunitas yang dominan (Jufri: 2005).

#### **4.2 Relasi Partisipasi pada Wacana Interpelasi**

Pada wacana perseteruan presiden dan DPR tentang interpelasi disertakan beberapa pihak yang saling berhubungan. Pihak presiden diwakili oleh SBY, wapres, Hatta Rajasa, Andi Mallarangeng. Pihak DPR diwakili oleh Yudi Crisnandi, Ali Mochtar Ngabalin, dan T. Gayus Lumbuun. Dalam Teks berita tentang interpelasi, komentar pihak DPR hampir seluruhnya ditempatkan pada bagian akhir teks. Sedangkan perlakuan sebaliknya terjadi pada pihak presiden, komentar dan pendapatnya menjadi pembuka berita. Bahkan komentar Andi Mallarangeng sebagai juru bicara kepresidenan ditampilkan utuh dalam satu bentuk berita tersendiri.

Berdasarkan gambaran di atas dapat dilihat relasi antara kedua partisipan dalam teks berita. Gejala penempatan partisipan dalam teks, bukan hanya menggambarkan bagaimana peristiwa

tersebut dibungkus, tetapi juga bagaimana kekuasaan sosial direpresentasikan dalam berita. Umumnya kelompok elit/dominan yang berkuasa lebih diuntungkan dalam pemberitaan (Eriyanto,2003). Pihak pemerintah mendapat tempat yang lebih dominan dalam pemberitaan. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan yang dimilikinya lebih diapresiasi oleh penulis berita. Berikut ini ditampilkan anak judul berita yang dominan memihak pada kubu SBY antara lain:

*Presiden Yudoyono bersedia berkomunikasi dengan wakil rakyat  
Interpelator siapkan 3 Skenario, F-PD Yakin Lancar  
Wapres: Interpelasi Hal Biasa  
Andi Mallarangeng: Jangan Ada Standar Ganda*

Hal yang tak kalah pentingnya adalah melihat bagaimana khalayak di tempatkan dalam pemberitaan. Bagaimana pola hubungan antara wartawan dan partisipan lain itu dikomunikasikan. Pada pemberitaan seputar interpelasi khalayak pembaca ditempatkan sebagai penerima informasi yang pasif. Wartawan menempatkan informasi sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan pihak yang menginginkan interpelasi adalah pihak yang menzalimi.

Fairlough (1995) menegaskan apa yang terjadi pada wacana berita seputar interpelasi adalah sesuatu yang kompleks. Apa yang muncul dalam teks sesungguhnya adalah bagian akhir suatu proses yang kompleks dari berbagai kekuatan, aturan, regulasi dan negosiasi yang menghasilkan fakta tertentu. Proses yang kompleks itu paling tidak terjadi di dua sisi. Pertama, dalam ruang redaksi dan institusi media bersangkutan yang melibatkan banyak kepentingan individu, ideologi wartawan bersangkutan yang melibatkan banyak kepentingan individu.

Partisipan dalam wacana berita

seputar interpelasi tidak mendapatkan relasi antara satu dan lainnya secara kebetulan saja. Relasi itu di buat secara sengaja oleh pembuat berita sebagai sebuah bentuk ideologi dan kekuasaan. Penempatan judul berita, anak judul berita dan partisipan dalam wacana interpelasi DPR dan presiden menunjukkan ideologi dan kekuasaan yang diperjuangkan oleh masing-masing partisipan.

## 5. Penutup

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap wacana berita seputar interpelasi DPR kepada presiden dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosakata dalam berbagai berita terkait interpelasi dibagi ke dalam tiga bagian yakni; penggunaan klasifikasi kata tertentu untuk menunjukkan identitas; pilihan kosakata ekspresif secara ideologis dalam wacana interpelasi; relasi partisipan pada wacana interpelasi.

Penggunaan klasifikasi kata tertentu untuk menunjukkan identitas yang digunakan partisipan dalam wacana interpelasi DPR menunjukkan bahwa tiap kelompok berusaha menonjolkan kelompoknya sekaligus memarjinalkan yang lain.

Inti interpelasi minta keterangan presiden, bukan mengundang presiden dan jangan sampai hal ini merupakan permainan politik.

Dari sisi nilai ekspresi dalam wacana berita seputar interpelasi DPR dari lembaga DPR dan presiden dikategorikan ekspresi yang baik. Nilai ekspresi positif tersebut lebih banyak digunakan oleh presiden misalnya; *membangun rasa percaya diri; kedewasaan berpolitik*; sedangkan kalangan DPR misalnya kosakata; *posisi sejajar*.

Dari sudut pandang relasi partisipan dalam wacana berita terhadap interpelasi dapat disimpulkan bahwa pihak presiden dan kelompoknya lebih mendapat

apresiasi yang lebih baik dari penulis berita.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cook, Guy. 1994. *The Discourse of Advertising*. London: New Cork Routledge.
- Eriyanto, 2003. *Analisis Wacana: Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LkiS
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited.
- Jufri: 2007. *Metode Penelitian Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maleong, Lexy J. 1997. *Metedology Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Posda Karya.
- Schriffin, Deborah. 2007. *Approach to Discourse* diterjemahan oleh Unang, dkk dengan judul *Ancangan Kajian Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Dijk, Teun A. 1993. 'Principle of Critical Discourse Analysis'. *Discourse and Society*. Vol.4(2):249-283



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.